

BAB III

ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS

A. Arti dan Fungsi Etika

Setiap manusia mempunyai keinginan dalam dirinya untuk menjadi yang sempurna. Manusia saat dilahirkan berada dalam keadaan serba tidak sempurna. Oleh karena itu untuk menjadi semakin sempurna, manusia memerlukan landasan etis, yang pada akhirnya akan memandunya untuk menjadi manusia yang sempurna dalam realitasnya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang berarti kebiasaan atau watak. Etika lebih menekankan kepada pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang. Sedangkan moral lebih merupakan cara hidup atau kebiasaan, dan moral juga dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sebagaimana dijelaskan oleh Franz Mangnis Suseno, bahwasanya ajaran moral berdasarkan pada pertanyaan “bagaimana saya harus hidup?”, “apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang wajib saya perbuat?”, ajaran tentang moral hanya mengajukan kepada norma-norma tentang bagaimana hidup kita diarahkan. Sedangkan etika adalah filsafat yang membahas tentang ajaran moral, etika pertama-tama tidak mengajarkan kepada apa yang wajib dilakukan oleh seluruh manusia, akan tetapi etika berusaha menjawab sebuah pertanyaan yang

berhubungan dengan ajaran moral secara rasional, serta bertanggung jawab.¹ Dengan kata lain, etika merupakan sebuah usaha untuk merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil menjadi sebagai manusia. Jadi, makna etika (makna luas), yaitu sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya.

Sedangkan menurut Juhana S. Praja, yang menjadi obyek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan atau persoalan-persoalan dalam bidang moral, pernyataan yang pertama, merupakan pernyataan yang berkaitan dengan tindakan manusia. Sedangkan yang kedua, yaitu, pernyataan yang berkaitan dengan manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud, dan watak.²

Dari obyek di atas, persoalan tentang moralitas dan etika dapat dikaji dan didekati dengan beragam metode,³ yaitu, terdapat pendekatan yang akhirnya dinamakan dengan etika deskriptif (*descriptive ethics*), dari model pendekatan ini kita mempelajari tentang bagaimana tingkah laku pribadi-pribadi atau *personal morality* dan tingkah laku kelompok atau *social morality*, dari sini kita berupaya menganalisa bermacam-macam aspek dari tingkah laku manusia seperti, motif, niat dan tindakan-tindakan terbuka. Pemeriksaan ini hanya berupaya

¹Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 1999), 10.

²Juhaya S. praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika; Sebuah Pengantar* (Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1997), 42.

³Harold H. Titus, *Pesoalan-Persoalan Filsafat*, ter. M. Rasjidi (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984)141-142.

mendeskripsikan tentang apa yang terjadi. Etika jenis ini juga biasanya disebut dengan ilmu kesusilaan

Berbeda halnya dengan etika normatif (*normative ethich*) yang mendasarkan penyelidikannya pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam ruang kehidupan. Etika normatif tidak hanya sekedar merupakan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku yang baik dan perilaku yang jelek. Dan biasanya disebut dengan ajaran kesusilaan.

Lain lagi halnya dengan etika kritik atau *metaethics*, yang memfokuskan perhatiannya pada istilah dan bahasa yang dipakai dalam diskusi, serta corak fikiran yang digunakan untuk membenarkan pada suatu pernyataan etika.

Jadi etika tidak berfungsi membuat manusia menjadi lebih baik, melainkan merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis ketika seorang manusia berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika berupaya ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu guna berargumentasi secara rasional dan kritis. Dengan kata lain, orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralitas budaya.

Beragam manfaat yang dapat kita raih dalam mempelajari etika. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin plural, kita sering berhadapan dengan beragam orang yang berasal dari suku, agama dan bangsa yang berbeda. Proses transformasi masyarakat yang membawa perubahan yang sangat signifikan, yaitu gelombang modernisasi dibarengi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengakibatkan sekat-sekat teritorial semakin sulit untuk

dibedakan. Realitas yang semakin mengglobal ini membuat kita sering dihadapkan dengan sekian persoalan pandangan moral yang saling berbeda, dan setiap pandangan moral tersebut mempunyai pendasaran yang berbeda.

Dengan situasi yang seperti di atas, etika berupaya untuk memberikan satu pendasaran agar kita tidak kehilangan orientasi dalam menjalankan proses kehidupan ini, dan etika juga berfungsi untuk memberikan pendasaran agar kita dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh berubah, serta dengan pendasaran etikalah kita dapat mengambil satu bentuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

B. Etika Dalam Lintasan Sejarah

1. Pemikiran Etika Zaman Yunani

Etika merupakan cabang dari *axiologi* (kajian filsafat yang membahas tentang nilai). Secara historis munculnya etika berawal dari keambrokan tatanan moral yang terjadi di lingkungan kebudayaan Yunani. Karena pada waktu itu, pandangan-pandangan lama tentang yang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, mereka mulai menyangsikan akan nilai yang baik dan buruk.

Jejak-jejak pertamanya muncul pertama kali di kalangan murid Pythagoras (baca: Pythagorean), Menurut mereka prinsip-prinsip matematika merupakan dasar segala realitas. Mereka juga menganut ajaran reinkarnasi, badan bagi mereka merupakan kubur jiwa, persahabatan dan persaudaraan bagi semua orang merupakan nilai tertinggi.⁵

⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 15-16.

⁵Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 12.

Dalam Mazhab Pytagorean etika berhubungan dengan matematika, dalam amatan mereka (baca: Mazhab Pytagorean) yang menghubungkan di antara keduanya adalah suatu ajaran etika yang memuliakan terhadap pola hidup yang kontemplatif. Seperti yang dikutip oleh Bertrand Russell,⁶ Burnet meringkaskan etika Mazhab Pytagorean sebagai berikut :

"Kita adalah orang-orang asing di dunia ini, dan tubuh adalah kuburan bagi jiwa, akan tetapi tak seyogyanya kita mencoba membebaskan diri dengan jalan bunuh diri; sebab kita adalah milik Tuhan yang merupakan gembala kita, dan tanpa perintahnya kita tidak berhak untuk bebas. Dalam hidup ini ada tiga jenis manusia, sebagaimana ada tiga macam khalayak yang mengunjungi pertandingan Olympiade. Kelas terendah terdiri dari mereka yang datang untuk membeli dan menjual, kelas di atasnya adalah mereka yang bertanding. Namun yang terbaik di antara semuanya adalah mereka yang menonton. Penyucian diri di antara semuanya dengan demikian adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari pamrih, dan manusia yang mengabdikan dirinya pada bidang itulah, yakni seorang filsuf sejati, yang paling berhasil membebaskan dirinya dari jentera kelahiran".⁷

Maksud dari uraian di atas adalah bahwasanya perubahan nilai sangat erat berhubungan dengan sesuatu yang terjadi dalam realitas sosial, bagi kita mungkin terkesan aneh, namun bagi mereka yang sudah mengalami puncak ekstasi akibat dari terbukanya pemahaman yang tidak terduka dari matematika.⁸

Setelah Pytagoras muncullah Demokritos, menurutnya nilai yang tinggi adalah sesuatu yang dipandang dan dinikmati serta terasa enak, dengan demikian Demokritos berusaha menganjurkan dan meletakkan dengan sesuatu yang hedonistik.

⁶Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, ter. Sigit Jatmiko dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 43.

⁷*Ibid.*, 43.

⁸*Ibid.*, 44.

Selanjutnya kaum Sofis, mereka merupakan para rasionalis dan skeptis pada zaman Yunani kuno. Mereka menegaskan bahwasanya nilai baik dan buruk tergantung pada keputusan dari masing-masing individu atau kesepakatan bersama dan tidak mementingkan ada aturan yang abadi.

Adalah Sokrates (469-399) SM, ia berupaya untuk mengatasi skeptisme yang mulai digagas oleh kaum Sofis, dengan metode dialogis, ia berupaya untuk menghantarkan seseorang dari pemahaman yang dangkal menuju kepada pemahaman yang sangat mendalam (komprehensif). Dalam keyakinannya seseorang akan berlaku benar apabila ia mengetahui akan sesuatu yang baik baginya. Dari ajaran inilah Sokrates berupaya untuk menggapai kebijaksanaan yang sebenarnya. Ia merelakan dirinya untuk meminum racun, sebagai bukti kesungguhannya untuk menyakini diri sendiri tanpa risau kepada orang lain.

Sedangkan dalam amatan Platon,⁹ seorang murid dari Sokrates mendasarkan ajaran etikanya kepada idea yang baik, idea yang baik merupakan sang baik sendiri, sang baik merupakan realitas tertinggi dalam kehidupan ini. Sang baik juga merupakan tujuan (*telos*) dari segala yang di dunia ini. Idea yang baik merupakan puncak kebahagiaan¹⁰ yang sesungguhnya.

Baginya, kodrat manusia terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu, akal budi, jiwa, dan hasrat. Akal budi bersifat teoritis sekaligus bersifat praktis sesuai

⁹Platon dilahirkan di Athena 428, kita menyebutnya di Indonesia dengan Plato, hal ini disebabkan oleh pemikiran filsafat yang masuk pada negara kita melalui bahasa Belanda, sedangkan kata Yunaninya adalah Pla/twn (Platon) rasanya ini (baca: sebutan Plato dengan Platon) lebih sesuai kalau kita melihat kata-kata turunannya Platonisme, Platonic, Setyo Wibowo, "Idea Platon Sebagai Cermin Diri", *Basis*, 11-12 (November-Desember, 2008), 4-5.

¹⁰Kebahagiaan secara etimologis, berarti keadaan senang tentram, terlepas dari segala yang menyusahkan atau secara negatif dapat dikatakan, kebahagiaan adalah lawan kata dari penderitaan, yang artinya, suatu keadaan yang berlangsung (*a lasting condition*) dan bukanlah perasaan dan emosi yang berlalu, W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral* (Bandung: Remadja Karja, 1986), 30.

kodratnya. Pembahasannya tentang jalan hidup bertujuan pada jalan yang benar secara universal dan berlaku pada seluruh umat manusia.

Berbeda dengan Platon, adalah Aristoteles, seorang filsuf yang dilahirkan di Stagira di Thrace pada kisaran tahun 384 SM. Putra dari seorang dokter pribadi kerajaan Makedonia.¹¹ Berbeda dengan pendahulunya yang juga sekaligus gurunya (baca: Platon), ia merumuskan konsep etikanya bahwa konsep yang baik adalah kebahagiaan, sebuah aktivitas yang berangkat dari jiwa.

Etika Aristoteles bertitik pangkal pada realitas, bahwa tujuan manusia hendak mengejar kebahagiaan (*eudaimonia*). Sarana-sarana dan upaya-upaya yang dipilih manusia dinilai berdasarkan tujuan kebahagiaan. Kebahagiaan itu menyangkut manusia jiwa-raga sebagai anggota masyarakat, karena manusia merupakan makhluk yang “hidup ber-polis” (*polis* kota sebagai kesatuan negara pada masa Yunani kuno, sudah lama sebelum Aristoteles). Manusia ialah “*zoon politikon*“. Ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah hidup dalam polis, maka Aristoteles sangat menekankan sosialitas manusia. Masyarakat dalam bentuk negara itu dilihat Aristoteles sebagai suatu lembaga kodrati (*natural institution*), yaitu bukan berdasarkan persetujuan (*convention*) saja seperti diajar oleh para sofis dan skeptikus pada masa itu.

Di dalam pemahaman etikanya, ia memberikan satu tempat yang khusus, ia tidak lagi memberikan arahan pada hukum-hukum yang bersifat kekal, mutlak, dan tanpa syarat di dalam dunia kita tanpa melalui proses pengindraan kita (baca:

¹¹Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, ter. Sigit Jatmiko dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 217.

Realis).¹² Seperti yang dijelaskan oleh M. Hatta, bahwasanya tujuan hidup menurut Aristoteles bukan untuk mencapai kebaikan dengan kebaikan, melainkan tujuan hidup adalah kebahagiaan. Ada tiga hal yang harus ditempuh oleh seorang manusia guna mencapai kebahagiaan dalam hidup di antaranya adalah:¹³

Pertama, manusia harus memiliki harta yang cukup, supaya hidupnya terpelihara. Kemiskinan hanyalah menghidupkan jiwa manusia untuk berbuat yang rendah (baca: jelek).

Kedua, persahabatan merupakan alat yang terbaik dalam menggapai kebahagiaan, menurutnya persahabatan lebih penting dari keadilan. Sebab, kalau semua orang bersahabat, maka dengan sendirinya keadilan akan terjadi di antara mereka. Ia juga mengumpamakan bahwasanya seorang sahabat sama halnya dengan dua jiwa dalam diri mereka.

Ketiga, keadilan, ia membagi keadilan menjadi dua bagian. Pertama keadilan dalam makna pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing. Kedua keadilan dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, hal ini berkaitan dengan keadilan dalam ranah hukum. Sangatlah jelas bahwa Aristoteles dalam konsep etikanya, dan merupakan salah satu hal yang sangat mengagumkan adalah ia mendasarkan pada sebuah bentuk pengandaian yang bersifat *praxis*.

Praxis tidak sama halnya dengan “praktek”, *praxis* juga tidak dapat disamakan dengan “kesibukan praktis” yang membutuhkan keterampilan. *Praxis* (tindakan) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu manusia untuk dirinya

¹²Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat barat I* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 52.

¹³Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 132-134.

sendiri, akan tetapi praxis menuntut adanya partisipasi dalam kehidupan bersama dan komunitas yang melingkupinya. Dalam ranah *praxis*, seorang manusia menegaskan dirinya sebagai makhluk sosial, oleh karenanya perkataan etis, menurutnya hampir sama dengan “politis” dan “praktis”, baginya juga erat kaitannya antara etika dengan politik, karena dengan etika manusia dapat merealisasikan dirinya sebagai makhluk sosial dan dengannya seorang manusia dapat mencapai optimum kebahagiaan.¹⁴

Jadi dalam konstruksi pemikiran etika Aristoteles, terdapat pertautan internal antara rasio praktis dengan komunitas kultural terutama dalam mencapai konsensus (baca: kesepakatan) guna menentukan dan mencapai tujuan bersama dalam sebuah negara.

Filsafat pasca Aristoteles, kira-kira lima abad kemudian merupakan transmisi pemikiran filsafat dari tanah Yunani menuju Romawi, hal ini tidak terlepas dari karir pemerintahan yang ditandai dengan pemerintahan Aleksander yang agung yang juga disinyalir pernah menjadi murid dari Aristoteles, pada perodesasi ini lazim disebut dengan zaman Hellenisme.¹⁵

Hellenisme berasal dari kata *hellenizein*, yang mempunyai arti sebuah gerakan pemikiran yang berbahasa Yunani dan menjadikan Yunani sebagai referensi pemikiran dan kebudayaan.¹⁶

Adalah Epikurianisme dan Stosisme, keduanya merupakan gerakan pemikiran yang berpengaruh pada zaman Hellenisme. Epikurianisme adalah sebuah aliran yang *dinibatkan* kepada Epikuros, seorang filsuf yang dilahirkan

¹⁴Suseno, *13 Tokoh Etika....*,33-35.

¹⁵Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat....*, 54.

¹⁶*Ibid.*, 54.

pada tahun 314 SM di kota Yunani, Samos. Seorang pribadi yang luhur dan sangat memikat, pujian kepadanya mengalir deras karena pola hidup yang ia jalankan sangat sederhana, kebaikan hatinya membuat orang lain terpukau kepadanya.

Inti dari ajaran filsafatnya yaitu, lari dari keramaian, semboyan terkenalnya adalah “hidup dalam kesembunyian”, sedangkan ajaran etikanya adalah yang baik yang menghasilkan nikmat dan yang buruk adalah apa yang menghasilkan pada sesuatu yang tidak enak. Akan tetapi perlu dibedakan antara nikmat dalam pemahaman Epikorus berbeda halnya dengan hedonism, karena nikmat yang diperoleh dari sebuah proses bathin (rohani) bukan jasmani.¹⁷

Secara garis besar pemikiran etika mazhab Stoa sama dengan pemikiran etika sebelumnya, yaitu sebuah seni hidup guna menggapai kebahagiaan, prinsip dasar dari pemikiran etika mazhab Stoa adalah penyesuaian diri dengan hukum alam, jadi perbuatan baik menurut mereka adalah bentuk perbuatan yang sesuai dengan hukum alam. Dalam proses penyesuaiannya dengan alam dengan langkah menjadikan alam semesta sebagai miliknya.¹⁸

Dari uraian singkat di atas, bahwasanya konsep etika pada zaman Yunani kuno, hanya mengatur terhadap atau guna mencapai kepada baiknya proses kehidupan manusia. Sebuah proses kehidupan yang sarat dengan arti (baca: bernilai)¹⁹

Adapun tujuan dari etika yang dirintis oleh para filsuf Yunani tidak lain hanyalah menemukan aturan atau sebuah arahan agar kehidupan manusia utuh dan

¹⁷K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 237.

¹⁸Suseno, *13 tokoh Etika...*, 56-57.

¹⁹*Ibid.*, 17.

bulat, dan tidak hanya mempertahankan atau memperjuangkan kehidupan, melainkan juga bagaimana mencapai hidup yang bernilai.

2. Pemikiran Etika Abad Pertengahan

Sebelum munculnya agama Kristen di Yunani dan Romawi, telah terjadi krisis agama yang sangat serius, setiap *polis* (negara-kota) memiliki dewa dan dewinya masing-masing yang erat hubungannya dengan realitas kehidupan mereka. Namun pada saat dewa dan dewi mereka seakan kehilangan pamornya akibat skeptisisme yang dimunculkan oleh Epikuros. Dewa-dewi kuno mulai diganti dengan keyakinan pada penyelenggaraan akal (*logos*) yang “ilahi”, di luar dan di atas semua peristiwa dan semua manusia. Penyelenggaraan itu malah sudah terpantul dan dapat ditemukan pada setiap manusia secara mikrokosmis. Untuk itu, manusia harus mencapai ketenangan batin dengan melaksanakan asketis.

Di samping itu, juga telah terjadi krisis politik yang berakibat pada pemujaan akan polis-polis, serta mulai memudarnya sikap patriotisme yang melanda kaum terdidik mereka.

Runtuhnya kekaisaran Romawi Barat sampai jatuhnya Konstantinopel pada kisaran tahun 500 SM, dan mulai berkuasanya suku-suku liar yang kerap kali berperang antara suku yang satu dengan yang lainnya, menandakan bahwa zaman ini *mafhum* kita kenal dengan berawalnya Zaman Pertengahan atau lebih kita kenal dengan abad kegelapan sedang melanda Eropa.²⁰ Sedangkan peradaban di belahan dunia yang lain sedang mengalami masa jaya-jayanya. Begitu juga halnya

²⁰Henry S. Lucas, *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*, ter. Sugihardjo Sumobroto & Budiawan (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993), 39.

dengan peradaban Islam sedang mengalami masa keemasannya. Gereja Kristen mempunyai peranan penting dalam membangun kembali peradaban di Eropa.

Adalah Augustinus, seorang filsuf yang dilahirkan di kota Hippo di Afrika Utara, di wilayah yang terkenal dengan Aljazair, pada tahun 430 M. Seorang filsuf yang berupaya mengawinkan antara ajaran Platonisme dengan ajaran Kristianitas.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwasanya aliran Neo-Platonisme berpandangan bahwa semua yang ada dan yang dapat disaksikan, termasuk manusia sendiri, berasal dari “Yang Esa”, dan terus menerus mengalir (*emanasi*) dari Yang Esa itu tanpa ada batas yang jelas antara keduanya (selain emanasi dipakai juga istilah “*perilampsis*“ (penyinaran). Pada realitas yang lain, munculnya penyebaran ajaran iman kristiani sedang pada masa puncak dengan dukungan kesatuan umatnya.

Ajaran etika dari sang filsuf dan teolog Augustinus adalah hampir sama dengan etika pada zaman Yunani, ia berpendapat bahwa hidup yang baik dalam arti moral adalah hidup yang menuju kepada kebahagiaan, akan tetapi ada nuansa yang berbeda pada *diktum* selanjutnya, hal ini tidak terlepas dari keyakinannya akan iman Kristiani. Dalam ajarannya, kesadaran akan dunia dirubahnya menjadi kesadaran akan Transendensi. Kesadaran ini berawal dari refleksi filosofisnya akan keadaan setelah mati. Sistem etika pada zaman Yunani tidak membahas realitas ini.²¹

Selanjutnya adalah Santo Thomas Aquinas, seorang filsuf terbesar pada abad pertengahan. Ia dilahirkan pada tahun 1225 di Roccasecca Italia, seorang

²¹Suseno, *13 Tokoh Etika...*, 66-67.

anggota dari ordo tarekat Santo Dominicus. Dalam ajaran etikanya, ia berupaya mengikuti kerangka dasar dari sistem etika Aristoteles, baginya tujuan manusia tidak lain adalah mencapai kebahagiaan. Seperti halnya Aristoteles dengan bahasa yang berbeda, menurutnya seorang manusia akan mencapai pada fase kebahagiaan dengan cara *contemplatio* (kontemplasi), dalam memotret Yang Ilahi. Akan tetapi ia berhasil menjadi penyempurna bagi para filsuf selanjutnya. Menurut Thomas Aquinas kita dapat mengetahui akan yang baik dan jahat melalui hukum kodrat. Hukum kodrat ini dapat kita ketahui melalui akal budi kita.

Dari deskripsi di atas, bahwa konstruksi pemikiran filsafat etika pada abad pertengahan, yaitu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam dunia dan kehidupan setelah di dunia ini. Dari penjelasan singkat dan sederhanya ini, baik dalam pemikiran Augustinus maupun Santo Thomas Aquinas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keduanya berpendapat bahwa tujuan hidup yaitu untuk mencapai kebahagiaan, dan digabungkan dengan pendasaran dalam ajaran teologi kristiani.

3. Pemikiran Etika Abad Modern

Istilah '*modern*' berasal dari kata Latin '*moderna*' yang mempunyai arti sekarang, baru, atau saat ini. Ahli sejarah bersepakat, bahwasanya abad modern dimulai sekitar tahun 1500, sejak saat itulah abad modern dimulai. Modernitas bukan hanya bertautan dengan periodisasi. Akan tetapi, modernitas juga

berkaitan dengan suatu bentuk kesadaran yang kaitannya dengan kebaruan, perubahan, revolusi, kemajuan dan pertumbuhan.²²

Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu: subjektivitas, kritik dan kemajuan. Subjektivitas yang dimaksud bahwasanya manusia menyadari akan dirinya sebagai pusat sejarah, pusat realitas yang menjadi ukuran dari segala-galanya. Hal ini bisa kita lihat dari pengandaian Rene Descartes seorang filsuf yang dilisensi sebagai bapak filsuf modern, yaitu: "*Cogito Ergo Sume*" (Aku Berfikir, Maka Aku Ada), semangat individualitas sangat nampak sekali pada zaman yang kita pahami sebagai abad modern.

Selanjutnya adalah kritik, yang dimaksud di sini adalah secara implisit sudah termaktub dalam subjektivitas, dengan kritik dimaksudkan bahwasanya rasio bukan hanya menjadi sumber dari segala pengetahuan yang diperoleh, melainkan rasio juga menjadi medium sebagai pembabasan individu dari segala tindak-tanduk tradisi yang tidak rasional, fungsi rasio adalah menghancurkan pada prasangka-prasangka yang menyesatkan.²³

Sebagai sebuah gerakan pemberontakan intelektual, abad modern ditandai dengan kritik tajam terhadap pemikiran yang tradisional pada abad sebelumnya (baca: abad pertengahan), sebuah abad yang ditandai dengan kesatuan, keutuhan, dan totalitas yang koheren dan sistematis dan tampil dalam bentuk metafika atau ontologi.

²²F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern; Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 2-3.

²³*Ibid.*, 4.

Menurut F. Budi Hardiman, pemberontakan intelektual pada abad modern bisa dilihat dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu: ²⁴

Pertama, dari gejala yang terjadi, kita beranggapan bahwasanya modernitas ditandai sebagai disintegrasi intelektual. Filsafat pada abad modern lebih terlihat sebagai anarkhi dan kekacauan dari pada ketertiban dan keutuhan.

Kedua, abad modern juga dipahami sebagai gerakan emansipatif, sebuah bentuk kemajuan berfikir, dari mandegnya pemikiran dan pendewasaan kepada hal-hal yang berbau metafisis. Dalam abad sebelumnya (baca: abad pertengahan) terdapat dua sumber otoritatif yang selalu dijadikan rujukan, yaitu, Aristoteles dan Kitab Suci, dalam tradisi pemikiran modern dua rujukan inilah yang dijadikan bulan-bulanan kritik.²⁵

Zaman modern yang terkenal dengan filsafat kesadaran²⁶ atau filsafat subjek, suatu paradigma yang mengenali dan menguasai objeknya secara monologal, misalnya ilmu-ilmu kemanusiaan, didekati dengan menggunakan metode ilmu alam, berusaha untuk merumuskan hukum-hukum yang melandasi pada tindakan atau perilaku manusia dengan cara mengobyektifikasi manusia, mengambil jarak dengan obyeknya dengan alasan netralitas ilmu pengetahuan,

²⁴*Ibid*, 4-5.

²⁵Dalam hal ini mulai ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan, yang kita kenal dengan pengetahuan modern, yakni ilmu-ilmu alam, dalam realitas pemikiran modern tidak lagi berbicara atau memperdebatkan pada sesuatu yang bersifat Adikodrati, entah itu yang disebut dengan Allah, roh, dan dst. Para filsuf modern menyibukkan dirinya untuk mencari pendasaran metode guna mencapai pengetahuan yang benar. Dengan peralihan minat ini refleksi akan sesuatu yang Adikodrati mulai bergeser menjadi refleksi pada diri manusia (*baca: antroposentrisme*), seperti halnya, rasio, subjektivitas, persepsi dll.

²⁶Kesadaran atau "*consciousness*" adalah menyangkut terhadap segala hal yang kita sadari atau yang kita alami secara sengaja dan meninggalkan jejak pada ingatan, seperti: berfikir, merasa, imajinasi, mimpi dan pengalaman yang berkaitan dengan tubuh, Bagus Takwin, *Kesadaran Plural; Sebuah Sintesis Rasionalitas dan Kehendak Bebas* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 14.

jika perlu memanipulasi pada objek riset. Manusia tidak lagi dipandang sebagai aktor sosial, teman sederajat, melainkan sebagai objek riset.²⁷

Konstruksi pemikiran etika modern mencapai perumusan yang sistematis pada masa Immanuel Kant, pendasaran etika modern tidak lagi berangkat dengan titik pijak sebuah pertanyaan “bagaimana manusia mencapai kebahagiaan?”, konstruksi etika pada zaman tersebut (baca: Yunani dan Pertengahan) meletakkan kebahagiaan sebagai pusat etika.

Etika modern lebih menekankan pada otonomi moral, dan menjadikan kehendak sebagai pusat etika. Kant berpendapat bahwa manusia harus otonom dalam mengikuti dan menyakini sistem moral dengan kesadaran utuh, bukan karena menyesuaikan diri dengan konvensi sosial.²⁸

konsepsi otonomi moral dengan kehendak sebagai pusat etika, telah memantik Jürgen Habermas untuk melakukan kritik-otokritik terhadap pemikiran etika kewajiban Immanuel Kant, ia berpendapat bahwasanya manusia tidak mungkin dalam setiap waktu dan ruang dapat merefleksikan dirinya dalam tiap-tiap norma, nilai dan hukum, manusia juga tidak hidup dalam ruang yang hampa akan nilai, melainkan manusia selalu menemukan dirinya dalam suatu *lebenswelt*²⁹ (lingkungan yang dihayati).

²⁷F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 27.

²⁸Donny Gahral Adian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 118-119.

²⁹Konsep ini dipinjam dari fenomenologinya Edmund Husserl (1859-1938) adalah sebuah hambaran yang mendasari akan berlangsungnya semua bentuk interaksi sosial. Ini adalah sebuah gudang ilmu pengetahuan dan isinya beberapa interpretasi dari masa lampau yang terakumulasi. Bagaimana orang hidup sebelum kita memahami dunianya, dirinya serta hubungannya dengan orang lain. Tugas kewajiban mereka, beragam komitmen dan kesetiaan, agama dan hukum. Agar kita dapat memberi pengertian tentang segala hal yang mengitari kita atau juga sesuatu yang

C. Etika Diskursus Jürgen Habermas

Jürgen Habermas merupakan seorang pemikir dari Mazhab Frankfurt, ia mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan antara pengetahuan manusia dengan kepentingannya. Dalam Tradisi filsafat Barat yang mendikotomikan antara pengetahuan teoretis dengan pengetahuan praktis (Aristoteles), rasio teoretis dengan rasio praktis (Immanuel Kant) dan fakta dengan nilai (Hume, Neo Positivisme) telah mereduksi rasio manusia menjadi rasio instrumental yang sifatnya manipulatif dan kalkulatif. Dominasi terhadap realitas yang hanya berurusan dengan perangkat teknologis serta lupa akan tujuan hidup dari manusia itu sendiri (*good life*). Di dalam bukunya, *Knowledge and Human Interest*, ia mengemukakan bahwasanya ilmu pengetahuan dan kepentingan selalu berkelindan (baca:berhubungan). Kriteria bebas nilai yang dicanangkan oleh positivisme hanya membuat para ilmuwan buta dan lupa akan kepentingan sesungguhnya yang mendasari suatu penelitian ilmiah. Kebutaan tersebut membuat dominasi teknologi semakin menjadi-jadi tanpa mempertimbangkan pada tataran etis.³⁰

Begitu juga halnya tentang persoalan tentang etika, pertimbangan akan yang etis bukan lagi seharusnya hanya bersandarkan kepada eksperimen pemikiran yang berlangsung secara eksklusif dalam pikiran individu, melainkan harus menjadi sesuatu yang didialogkan. Filsafat Barat yang terus-menerus mencari, guna mendapatkan perspektif universal mengenai masalah-masalah yang

berada dalam diri kita. Maulidin Al-Maula, "Teori Kritis Civil Society", *Gerbang*, 13 Vol. 5 (Oktober-Desember, 2002), 228.

³⁰Suhermanto Ja'far, *Diktat Filsafat Kebudayaan* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel), 25.

berhubungan dengan etika. Dalam perspektif yang lain, filsafat Barat hanya menetapkan pandangan moral guna mengatasi persoalan individu saja, dan menilainya dengan cara tidak memihak. Mereduksi pengetahuan tentang etika bukan hanya menjadi permasalahan terverifikasi dan tidak terverifikasi, subyektif dan obyektif, fakta dan nilai. Hal semacam ini hanyalah merupakan Sebuah reduksi yang nantinya mempunyai konsekuensi pada mengeringnya keseluruhan pengalaman manusia menjadi pengalaman inderawi semata, dan menjadikan pengetahuan manusia hanya menjadi pengetahuan ilmiah-obyektif, serta kepentingan manusia hanya menjadi kepentingan prediksi, dan kontrol teknis semata.

Dalam rangka untuk mengatasi persoalan di atas, Habermas menyarankan agar sebuah masyarakat harus sesegera mungkin untuk membangun etika diskursus. Yang dimaksud dengan etika diskursus seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Ali Fauzi, etika diskursus bukanlah kategori-kategori imperatif, melainkan prosedur argumentasi moral. Yaitu, suatu justifikasi normatif untuk mencapai kesesuaian akan kepentingan antar anggota (*generalizable interest*).³¹ Atau suatu kondisi dari komunikasi yang nantinya akan menjamin kepada tercapainya sifat-sifat umum akan norma-norma yang dapat diterima, serta menjamin kepada otonomi individu melalui kemampuan emansipatoris sehingga menghasilkan pembentukan kehendak bersama lewat perbincangan rasional.

Dengan demikian, etika diskursus merupakan sebuah upaya dari Habermas untuk menerjemahkan teori tindakan komunikatif guna menjaga dan menjamin

³¹Ibrahim Ali Fauzi, *Seri Tokoh Filsafat Jürgen Habermas* (Jakarta: Mizan, 2004), 146.

pada terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat yang plural. Dengan kata lain adalah, realitas masyarakat yang plural tidak lagi bisa mengacu kepada suatu klaim nilai atau norma moral tertentu.

Etika diskursus lebih ditekankan sebagai sebuah proses legitimasi politik ketimbang sebagai validasi moral. Dalam hal ini Habermas menekankan akan pentingnya sebuah konsensus bukan sebagai persetujuan yang berdasarkan pada keseimbangan kekuatan atau semacam kompromi agar sama-sama senang, melainkan persetujuan yang validitasnya semata-mata didasarkan atas argumen yang terbaik.

Oleh karena itu, komunikasi pada dasarnya merupakan sebuah proses ketika seseorang berhubungan dengan orang yang lain. Komunikasi mengantarkan “ke-Aku-an” subyek mengenal kepada “yang-lain”. Karena ia mengenal manusia lain, ia juga menyadari dan mengakui akan pentingnya keberadaan sesamanya. Sangatlah jelas dalam hal ini bahwa komunikasi membangun suatu keterlibatan antara kedua belah pihak yang saling berkomunikasi, dan semua orang yang terlibat di dalamnya.

Dengan komunikasi, Habermas kemudian mengembangkannya menjadi tindakan komunikatif. Dalam hal ini bahasa menemukan peranannya. Tanpa bahasa, praksis komunikasi menjadi sesuatu yang mustahil. Dan bahasa tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang verbal semata, melainkan juga bahasa non verbal, yaitu bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Bahasa juga menghubungkan antara subjek dengan tiga wilayahnya, yakni wilayah eksternal yang mengacu kepada situasi di luar di mana subjek berada. Wilayah sosial yang mengacu kepada

totalitas hubungan antarpribadi yang memiliki aturan normatif dan yang ketiga adalah sebuah wilayah dunia yang mengacu kepada totalitas motivasi-motivasi serta tujuan dari pengalaman subjektif komunikator. bentuk dari komunikasi yang sehat dan bebas merupakan sebuah bentuk dari komunikasi yang ditandai dengan kebebasan dari setiap partisipan untuk menentang klaim-klaim tanpa rasa takut pada tindakan yang bersifat anarkis. Dalam komunikasi yang sehat, setiap peserta komunikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, berpendapat, membuat, mengambil keputusan, dan menampilkan diri (*self-presentations*) dalam mengajukan klaim normatif, serta berhak untuk menentang pendapat partisipan yang lainnya. Dalam arti yang lebih teknis, Habermas menyatakan, bahwa seorang individu yang melakukan tindakan komunikatif akan melakukan refleksi diri guna mencapai pengertian akan sesuatu di dunia ini. Refleksi diri yang dilakukan dengan cara menghubungkan penafsiran mereka dengan tiga bentuk klaim validitas yang bersifat konstitutif dari tindakan berbicara manusia.³²

Dalam merumuskan etika diskursusnya, ia bertolak dari konsep etika yang dirumuskan oleh Immanuel Kant. Dalam rumusan etikanya, Kant memulai dengan membagi akal budi manusia menjadi dua bagian, yaitu rasio teoritis dan rasio praktis. Rasio teoritis hanya bertugas untuk mengurusikan akan pengetahuan manusia (apa yang dapat saya ketahui), sedangkan rasio praktis hanya bertugas untuk mempersoalkan tentang perbuatan manusia (apa yang harus saya lakukan atau kerjakan).

³²Tiga klaim validitas yang dimaksud adalah klaim atas kebenaran yang dibentuk melakukan tindakan tutur yang bersifat konstatif, klaim atas kebenaran normatif yang dibentuk melalui tindakan tutur yang bersifat regulatif, dan klaim atas kejujuran yang dibentuk melalui tindakan tutur yang bersifat ekspresif. Reza A. A. Wattimena "Pembalikan Transendental Landasan Epistemologi Jürgen Habermas", <http://rezaantonius.multiply.com>.

Dari pendikotomian antara rasio teoritis dan rasio praktislah Immanuel Kant membangun rumusan etikanya. Tugas etika menurutnya, hanya bertugas untuk memeriksa pertimbangan-pertimbangan moral yang nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat, bukan untuk menetapkan sederetan norma moral.³³ Kant juga menekankan bahwa nilai baik dan buruknya perbuatan manusia tergantung kepada manusianya sendiri. Sesuatu dianggap baik menurutnya, apabila seorang manusia memenuhi kewajibannya akan sesuatu yang baik. Kehendak yang baik merupakan kehendak yang mau melakukan demi kewajibannya murni didasari oleh kewajiban itu sendiri. Otonomi subjek lebih merupakan sesuatu yang kodrati pada setiap manusia. Bagi Habermas, bahwa Immanuel Kant dengan otonomi subjek dianggap mendahului pada relasi dengan yang lain dalam interaksi sosial. Kant mendahulukan otonomi subjek dibandingkan dengan relasi intersubjektif yang terwujud dalam dunia sosial. Pandangan inilah yang pada nantinya berakhir pada konsepsi ruang publik yang monologis, dan ruang publik seharusnya tak terbatas. dan akan menjadi terbatas karena di dalamnya subjek dengan otonominya sudah sedari dulu memegang pendapatnya yang tidak boleh diganggu gugat. Artinya, segala keputusan publik harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang pada nantinya akan berdampak kepada seluruh aktivitas dari seluruh elemen masyarakat tersebut. Dalam ruang publiklah semua kepentingan-kepentingan yang berbeda didialogkan sehingga nantinya dapat dipertemukan serta didiskusikan guna mencapai konsensus bersama.

³³Franz Magnis Suseno, "75 Tahun Jürgen Habermas", *Basis*, 11-12 (November-Desember, 2004), 10-11.

Meskipun ia (baca: Habermas) menjadikan konsep etika kewajiban Immanuel Kant sebagai pijakan konsep etika diskursusnya, akan tetapi penerimaan ini bukan tanpa koreksi terhadapnya. Etika deontologis Immanuel Kant memang fenomenal, akan tetapi sangat problematis jika diterapkan dalam kehidupan nyata. Ia menerima etika kewajiban Immanuel Kant, yaitu "bertindaklah seolah-olah maksim tindakanmu dapat dilakukan secara universal". Dan Jürgen Habermas tidak menelan mentah-mentah terhadap imperatif tersebut. Ia berpendapat bahwa proses pertimbangan imperatif tidak boleh hanya dilakukan oleh seorang individu dalam kepalanya saja. Melainkan juga harus melibatkan kepada pribadi yang lain. Hal inilah yang menjadi rumusan dari etika diskursus yang dicanangkannya, ia memulai dengan diktum sebagai berikut:

"bahwa yang boleh meng*claim* keabsahan hanyalah norma-norma yang disepakati (atau dapat disepakati) oleh semua yang bersangkutan sebagai partisipan sebuah diskursus praktis, semua kesepakatan sejati hanya dapat dicapai dalam sebuah diskursus yang bebas dan terbuka".³⁴

Sangatlah jelas, bahwa ia melakukan kritik terhadap pengandaian rasio praktis yang bertumpu kepada Immanuel Kant. Rasio praktis menurutnya hanya beroperasi kepada filsafat subjek yang menjadi ciri khas dari filsafat modern. Rasio praktis tersebut hanyalah subjek tindakan yang menimbang baik dan buruknya suatu perbuatan secara sendirian (*monologis*), beda halnya dengan rasio praktis sebelum Immanuel Kant, dalam pengandaian filsafat Aristoteles, misalnya, rasio praktis masih berkaitan dengan secara internal dengan komunitas kultural. Tidak berhenti di sini, refleksi kritis atas pemisahan yang dilakukan oleh

³⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Abad Kedua Puluh* (Yogyakarta: Kanisus, 2006), 234.

Immanuel Kant, yang sudah memisahkan rasio praktis dari realitas sosial yang mengitarinya menjadi pendasarannya untuk memkritik Immanuel Kant.

Persoalan di atas pada akhirnya membawa Jürgen Habermas untuk merefleksikan tiga lapis abstraksi yang telah dilakukan oleh neo-Aristotelian seperti yang dijelaskan oleh Bur Rasuanto,³⁵ tiga lapis abstraksi tersebut adalah: pertama, abstraksi mengenai motivasi yang menyangkut kepada perubahan dari fokus akal praktis dari persoalan "apa yang baik bagi saya/kita?" menjadi persoalan tentang keadilan, apa yang harus orang lakukan?. Immanuel Kant memisahkan antara yang baik dari yang hak dengan disertai menyingkirkan kepada yang baik sebagai preferensi subjektif. Hanya yang hak yang dianggap sebagai domain yang tepat bagi moralitas. Putusan moral hanya terbatas kepada individu dan anggota komunitas di mana harus hidup. Semua nilai baik dan status moralnya dicabut. Sehingga yang tersisa hanyalah semacam impuls. Pecahnya kesatuan antara yang hak dan yang baik mengakibatkan pada munculnya pertanyaan mengapa orang harus bertindak secara moral dan hal ini tidak dapat dijawab secara memuaskan. Konsep otonomi yang dicanangkan oleh Immanuel Kant hanya menjadikan subjek berkehendak bebas sebagai satu-satunya penentu dari sebuah norma. Lapis kedua adalah abstraksi dari situasi partikular yang nantinya berhubungan dengan masalah aplikasi norma. Kant menurut Habermas, terjebak dan tidak peka terhadap konteks. Justifikasi moral tidak lebih hanya sekedar penerapan deduktif pada suatu prinsip dasar pada kasus-kasus partikular, sehingga etika kewajiban menjadi etika keyakinan yang kaku. Yang terakhir

³⁵Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawl dan Habermas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 108-109.

adalah abstraksi dari konteks institusi dan bentuk kehidupan yang ada, bagi sudut pandang moral Kantian, isu kognisi moral mendahului pada persoalan orientasi praktis. Kant menurunkan nilai kehidupan kolektif kepada refleksi abstrak dari subjek yang terisolasi. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh Habermas, akal praktis Kantian hanya mengatasi kepada wilayah validasi tradisi dan institusi-institusi yang konstitutif bagi bentuk kolektivitas kehidupan tertentu dengan adat kebiasaannya yang menjadi corak dari tradisi tersebut.

Dua lapis abstraksi di atas yaitu, abstraksi dari motivasi yang terlibat dan abstraksi dari situasi partikular tidak menemukan sarannya. Sedangkan yang ketiga, kata Habermas tidak dapat dibantah. Dalam hal motivasi, orang tidak bertindak menurut kepentingan teori melainkan sebuah tindakan manusia yang berdasarkan kepada kepentingannya. Teori hanya bertugas menunjukkan kepada prosedur untuk diikuti apabila seseorang berusaha untuk memecahkan sebuah problema moral, namun keputusan yang konkret hanya sepenuhnya berdasar kepada hal yang bersangkutan. Tidak berhenti di sini, Penolakannya terhadap neo-Aristotelian sebagaimana dijelaskan oleh Bur Rasuanto, bukan hanya berdasar kepada masalah akademik tapi mempunyai keterkaitan dengan masalah politik.³⁶ Bagi Habermas, apabila kita mau setia kepada keyakinan Aristoteles bahwasanya putusan moral berhubungan dengan etos suatu tempat tertentu. Dan kita harus siap untuk menyingkirkan emansipatori potensial universalisme moral dan hanya menolak kepada kemampuan akan penilaian moral yang nantinya akan memotivasi kepada agen-agen untuk bertindak sesuai dengan kekuatan rasional

³⁶*Ibid.*,110

yang mendasarinya. Tapi sejauh mana hal tersebut mempengaruhi tindakan, tergantung kepada individu, keadaan dan kepentingan yang mengitarinya.

Dalam hal di atas, Habermas berusaha untuk menafsir ulang serta berupaya ingin mengembalikan rasio praktis yang berkembang pada zaman modern dengan berpijak kepada gugusan sosial yang mengitarinya. Konsep subjek yang otonom hanya terkesan tanpa didasari oleh konteks, maka hal ini harus ditransformasikan menjadi subjek yang intersubjektif. Hal ini dapat kita temukan dalam gagasan tentang etika diskursusnya, ia berpendapat bahwasanya etika diskursus berpusat pada diskursus praktis³⁷, ajaran moral dianggap legitimit, yaitu tepat secara normatif, ketika norma-norma tersebut diterima oleh semua orang dalam diskursus praktis, guna menggapai ketepatan dalam tindakan yang mengatur masyarakat.

Sebagaimana dijabarkan oleh Francisco Budi Hardiman, bahwasanya Habermas mencirikan diskursus praktis sebagai prosedur komunikasi dan harus diuji melalui asas-asas pengujian secara diskursif.³⁸ *Pertama*, diskursus praktis sebagai prosedur komunikasi, dalam berkomunikasi seluruh peserta diberi kebebasan untuk berpendapat, bersifat inklusif, dan egaliter, serta bebas dari segala macam bentuk dominasi. Hal ini menjadi awalan dari prasyarat dalam berkomunikasi. Ia (baca: Habermas) mengkontruksi diskursus praktis dalam

³⁷Habermas membedakan antara dikursus teotitis dengan diskursus praktis, diskursus mempunyai arti dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “wacana”, wacana adalah ucapan yang dengannya pembicara menyampaikan sesuatu tentang hal apa saja kepada pendengar. Dalam rasio teoritis yang digali hanyalah terbatas pada pengetahuan manusia, sedangkan dalam rasio praktis dengan paradigma komunikasi sehingga dengan tercapai kesepakatan bersama secara rasional, tanpa embel-embel kepentingan yang terselubung di dalamnya.

³⁸F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 27.

konsep "idealisasi" komunikasi, dan menjadi prasyarat awal yang tidak boleh ditawar lagi. *Kedua*, asas-asas pengujian diskursif, pengujian model ini menjadi prasyarat kedua dalam merumuskan etika diskursusnya, pengujian secara diskursif yang dimaksud dengan tujuan agar berguna guna mendedah beragam kepentingan yang dibawa oleh peserta dari sebuah diskursus, karena Habermas menyakini bahwasanya setiap peserta tidak menutup kemungkinan membawa beragam kepentingan yang berbebeda. Pengandaian ini dimaksudkan untuk mencapai konsensus rasional, dan konsensus rasional yang dicapai harus juga dapat diterima oleh mereka yang tidak hadir.

Prasyarat yang kedua di atas, sangat erat kaitannya dengan tujuan dari apa yang dicanangkan oleh Habermas tentang prinsip *Penguversalisasian*, prinsip ini berdasar pada aturan dari sebuah proses argumentasi yang rasional. Prinsip "U" (baca: penguniversalisasian) berfungsi atau berguna untuk mencari sebuah pedasarana moral dari setiap tindakan atau norma. Prinsip ini disebutnya sebagai "pisau bedah" atau perangkat analisis dalam sebuah proses dari tindakan argumentasi rasional.

Dalam proses *pengunivesalisasian* ini, ia menggunakan apa yang disebutnya sebagai argumen pragmatika-universal. Maksudnya adalah, apabila seseorang masuk pada ranah diskursus dan bertukar pikiran di dalamnya, guna memastikan apa yang benar. Atau dengan kata lain, unsur universal (pragmatika universal) bahasa bukan hanya berpijak pada kompetensi linguistik, namun juga mempunyai kompetensi komunikatif dan memungkinkan adanya rekonstruksi

rasional secara universal. Proses rekonstruksi bermakna bahwa proses bahasa linguistik mengalami evolusi yang lebih luas yang memungkinkan akan terjadinya pemahaman antarsubjek. Dengan kata lain, bahwa sang subjek mengandaikan pada kesanggupan untuk mempertahankan kebenaran dari sebuah pernyataan yang disampaikannya. Inilah yang disebutkan dengan pragmatika universal, yakni semacam tuntutan yang mengandaikan bahwa apa yang saya katakan dapat diterima secara universal. Dalam hal ini tentang pragmatika-universal ia (baca: Habermas) menulis sebagaimana dikutip oleh Reza A. A. Wattimena,³⁹ bahwa bentuk rasionalitas terletak pada *telos* bahasa untuk mencapai pengertian bersama dan membentuk pada kondisi-kondisi yang memungkinkannya. Siapapun yang menggunakan bahasa untuk mencapai pengertian dengan pihak lain tentang sesuatu di dunia ini membutuhkan dirinya untuk mengambil tindakan performatif dan mengikatkan dirinya pada pengandaian-pengandaian normatif tertentu. Dalam proses ini pencapaian pengertian bersama. setiap pengguna bahasa harus mengandaikan bahwa setiap peserta mengejar tuntutan dengan tujuan mereka masing-masing tanpa ada gangguan di dalamnya. Serta mengikatkan dirinya pada persetujuan intersubjektif yang sudah dikroscek secara kritis klaim-klaim validitasnya. Dengannya mereka juga telah siap untuk melaksanakan atau melakukan terhadap apa yang telah menjadi konsensus bersama serta menjadi relevan terhadap interaksinya. Rasionalitas komunikatif melekat kepada setiap tindakan, yang dalam hal ini seseorang dalam menggunakan bahasa berusaha

³⁹Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 146.

untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, bahasa sudah mengandung unsur rasionalitas, yakni rasionalitas komunikatif.

Tindakan komunikatif menampilkan pada dua aspek: aspek teologis dan aspek komunikasinya sendiri. Hal yang pertama berhubungan erat dengan implementasi tindakan, sedangkan yang kedua berhubungan erat dengan proses mencapai konsensus bersama. Jadi, tindakan komunikatif mengandaikan kepada dua situasi sekaligus. Situasi tindakan dan situasi berujar (*speech situation*). Situasi yang dimaksud mengacu kepada dunia kehidupan yang dihayati. Dalam hal ini seorang aktor menjadikan dunia yang dihayati sebagai konteks sekaligus menjadikannya sebagai sumber.

Habermas juga mewajibkan bagi setiap proses argumentasi yang rasional harus mengandung pada sejumlah presuposisi yang antara lain adalah, *pertama*, setiap orang dengan kompetensi berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam suatu diskursus. *Kedua*, setiap orang diperbolehkan mempertanyakan pernyataan apa saja yang dikemukakan orang lain dalam sebuah proses komunikasi. *Ketiga*, setiap orang berhak mengajukan keputusan apa saja ke dalam sebuah diskursus. *Keempat*, setiap orang juga diperbolehkan mengekspresikan perilaku, keinginan dan kebutuhannya. *Kelima*, dalam proses komunikasi setiap peserta diskursus tidak dapat dicegah oleh koersi internal maupun eksternal untuk menjalankan hak-haknya.

Dalam prinsip penguniversalisasian ini menurut Habermas, hanya bertugas untuk mengoreksi pada norma-norma yang dapat diharapkan akan disetujui oleh

para peserta diskursus. Proses ini harus memaksakan akan adanya pertukaran peran antar sesama peserta diskursus.

Prinsip penguniversalisasian ini juga berhubungan dengan klaim kesalihan universal. Habermas berupaya untuk mempertahankan tentang universalisme Kantian. Akan tetapi, ia sekaligus menolak prinsip tersebut. Karena di dalamnya terkandung tentang pengandaian-pengandaian filsafat subjek. Setiap pernyataan universal harus dipandang sebagai kontribusi yang kebenarannya masih dapat diuji secara intersubjektif (*dialogis*). Jadi, prinsip penguniversalisasian hanya mempertahankan peran sentral agen-agen rasional sebagai sumber otoritas moral, sekaligus memberinya dimensi intersubjektif, sehingga mengalami pergeseran dari apa yang dikehendaki oleh setiap orang tanpa bertentangan dengan hukum umum kepada sesuatu yang dapat disetujui secara bersama sebagai norma universal. Baginya tidak ada cara yang lebih baik untuk mencegah orang lain menyelewengkan akan kepentingan kita selain terjun sendiri untuk menjadi peserta diskursus. Diskursus tentang moral memiliki tugas yang penting untuk melegitimasi dan memberi pendasaran kepada kebijakan-kebijakan atau norma-norma tindakan politis yang kontroversial. Dalam pandangan ini, etika diskursus bukan hanya mempunyai implikasi teoritis, akan tetapi etika diskursus juga berimplikasi pada ranah praksis.

Habermas menjelaskan bahwa setiap norma yang dianggap sah, jikalau sudah mendapatkan persetujuan dalam sebuah diskursus praktis. Dengan kata lain, norma yang nantinya dianggap sah atau benar harus sesuai dengan kepentingan-

kepentingan yang diuniversalkan. Pendasaran ini dirumuskan agar dalam ruang dinamika dari setiap peserta diskursus mencapai pada konsensus bersama.

Ia berpendapat dari latar belakang teori kritis Jerman dan sesuai dengan cita-cita dari proyek pencerahan yang ada, bahwasanya pengaturan masyarakat yang pluralistik tidak hanya didasarkan kepada suatu aturan atau tata nilai tertentu, melainkan haruslah didasari oleh prinsip yang menjamin dan mengekspresikan kepada kepentingan bersama, prinsip ini disebutnya sebagai keadilan sosial, atau disebutnya sebagai *the primacy of justice* yang dalam pandangan Jürgen Habermas tampil dalam distingsi antara etika dan moral, dan hadir diantara persoalan evaluatif yang hanya berkenan dengan preferensi subjektif dan persoalan normatif yang koekstensif dengan persoalan keadilan. Ia juga tidak secara langsung menempatkan keadilan dalam stuktur dasar masyarakat, melainkan hanya menempatkan keadilan sebagai kritik immanen, dalam kehidupan demokratis masyarakat yang plural persoalan adil dan tidak adil tidak bisa ditentukan di awal, melainkan harus dicapai melalui konsensus rasional yang berangkat dari diskursus praktis. Dalam hal ini Habermas berusaha mengintegrasikan antara konsep klasik kedaulatan rakyat dengan etika diskursusnya. Bagi Habermas, kedaulatan rakyat tidak boleh hanya dibayangkan absolut sehingga rakyat dapat menentukan segalanya, kedaulatan rakyat cukuplah dibayangkan sebagai kontrol atas pemerintah melalui peran ruang publik yang politis.

Jadi, etika diskursus berusaha bukan untuk bermaksud menciptakan norma-norma moral, melainkan sebuah sarana atau prosedur yang bersifat operatif untuk memeriksa kembali status norma-norma yang dipersoalkan. Etika diskursus yang dicanangkan oleh Jürgen Habermas tidak berkenaan dengan preferensi nilai melainkan kepada validitas normatif norma-norma tindakan. Hal ini mengandaikan kepada tindakan komunikatif, sebuah model tindakan yang berorientasi pada tercapainya pengertian diantara subjek yang terlibat di dalamnya. Di mana setiap pengujar dan pendengar mengandaikan perspektifnya masing-masing. Dengan maksud yang lain, Jürgen Habermas membangun teori etika diskursus dalam bingkai tindakan komunikatif yang menjadi dasar dari seluruh bangunan teorinya. Etika diskursus hanya mencakup kepada persoalan-persoalan praktis yang dapat diperbincangkan dan diperdebatkan secara rasional yang pada akhirnya mengandung prospek dicapainya sebuah konsensus bersama. Baginya etika diskursus, tidak hanya dicanangkan sebagai prosedur teoritis belaka. Akan tetapi, etika diskursus juga berimplikasi kepada ranah praksis. Dengan melibatkan semua elemen publik yang pada akhirnya menjadi daya penghubung antara dunia sistem dengan dunia kehidupan agar nantinya dapat menciptakan sebuah tatanan sosial yang integratif.